

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pengembangan sektor pertanian secara luas menyangkut proses perubahan menuju kemajuan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, distribusi ekonomi, dan sosial budaya bagi kesejahteraan petani (Dumasari, 2020). Pembangunan pertanian bagi negara agraris untuk meningkatkan potensi pengolahan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Ashari & Dyah, 2019).

Pembangunan pertanian memiliki beberapa syarat yaitu ketersediaan sumber daya manusia petani, lingkungan sumber daya alam, fasilitas input produksi, pasar produk, kelayakan harga produk, kebijakan pemerintah yang mendukung, kerja sama berpola kemitraan, dan teknologi terpilih. Dimana proses pembangunan pertanian memiliki keterkaitan dengan teknologi baru atau inovasi yang terbaik tepat sasaran dan tepat guna (Dumasari, 2020).

Pembangunan pertanian ditujukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari pada bidang pertanian. Upaya pembangunan sangat membutuhkan peran dari pemerintah melalui peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan pada sektor pertanian atau bisa disebut kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah

untuk mengatur, mengendalikan pada aspek pembangunan di sektor pertanian guna menjaga dan meningkatkan hasil panen (Ikhsani, et al., 2020). Pembangunan pertanian memanfaatkan teknologi terbaru yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan di pertanian lebih didominasi oleh penggunaan pupuk yang digunakan untuk menghasilkan komoditas yang berkualitas dan memiliki kuantitas dari hasil pertanian (Ashari & Dyah, 2019).

Pupuk merupakan bahan yang digunakan petani dalam mengelola lahan pertanian agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain meningkatkan hasil produksi, pupuk juga dapat mempercepat pertumbuhan pada tanaman. Penerapan pupuk atau penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan hasil produksi (Widarti et al., 2016). Ketersediaan pupuk menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjamin bagi petani untuk memperoleh pupuk agar dapat menjalankan aktivitas produksi pertanian (Irawan et al., 2016). Dalam hal tersebut pemerintah memberlakukan kebijakan mengenai pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian (Dalimunthe et al., 2021). Pupuk menjadi faktor produksi yang sangat dibutuhkan dalam produksi komoditas pertanian. Pupuk merupakan salah satu input dalam usahatani, dikarenakan pupuk menjadi faktor pertumbuhan tanaman sehingga mampu menghasilkan output yang maksimal (Fahmi & Maria, 2020).

Menurut (Jorgi et al., 2019) kartu tani merupakan sebuah alat yang digunakan oleh petani untuk melihat jumlah kuota pupuk subsidi yang didapat sekaligus juga menebus pupuk subsidi sesuai dengan jumlah kuota yang didapatkan melalui mesin EDC (*Elektronik Data Capture*). Selain itu, kartu tani dapat diakses untuk berbagai kegiatan seperti menabung, tarik tunai, pembayaran tagihan dan transfer antar bank. Untuk mendapatkan kartu tani, petani harus tergabung dalam suatu kelompok tani agar memperoleh kartu tani dengan melihat luas lahan, komoditas, jenis dan jumlah pupuk subsidi yang akan diperoleh petani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok). Penyediaan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK (Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok) merupakan kebutuhan yang riil bagi petani dalam satu periode atau satu tahun untuk mengelola usahatani (Widarti et al., 2016).

Pemerintah melakukan kebijakan terkait penyediaan kartu tani dalam subsidi pupuk. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan mengenai pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk (Budi et al., 2021) Dengan begitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan salah satu bank yang berada di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), kebijakan ini di peruntukkan mengoptimalisasi kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani di sektor pertanian. Pembelian pupuk bersubsidi diproses melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRI yang berada di Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL). Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK (Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok) setiap satu

periode atau satu tahun karena dalam pergantian tahun akan dilakukan pembaharuan data setiap tahunnya. Dalam satu tahun terdapat dua musim tanam padi kemudian dilakukan pemupukan dua kali dimusim tanam dalam satu tahun. Pengguna kartu tani tersistematis dengan aplikasi SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia), didalam sistem ini terdapat data nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan alokasi pupuk. Tujuan utama dari program kartu tani adalah penyaluran pupuk bersubsidi dengan memperhatikan tepat sasaran dan berlandaskan pada enam asas meliputi Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu dan Tepat harga (Ashari & Dyah, 2019).

Penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) dengan komoditas pertanian produksi tanaman pangan terbesar merupakan komoditas padi sawah sebanyak 128.219 kuintal pada tahun 2022. Dapat dilihat pada Tabel 1 jumlah produksi padi sawah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kebasen (kuintal) Tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Produksi Padi Sawah di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Desa/kelurahan	Jumlah produksi padi sawah (kuintal)
1	Mandirancan	4.536
2	Tumiyang	1.386
3	Gambar Sari	7.788
4	Kebasen	16.592
5	Cindaga	16.836
6	Kalisalak	21.896
7	Sawangan	12.672
8	Kaliwedi	8.576
9	Randegan	10.400
10	Karangsari	7.182
11	Bangsa	12.675
12	Adisana	7.680
	Jumlah	128.219

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas 2023

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwasannya jumlah produksi padi sawah di Kecamatan Kebasen sebesar 128.219 kuintal pada tahun 2022. Dengan rata-rata produksi padi sawah yaitu 6,60 Ton/Ha pada tahun 2023 dan menjadi posisi kedua setelah Kecamatan Jatilawang yang memiliki rata-rata produksi padi sawah di Kabupaten Banyumas. Pada dasarnya produksi padi membutuhkan pemupukan di awal tanam agar menunjang hasil produksinya. Pupuk subsidi sangat berperan bagi masyarakat petani khususnya petani padi. Untuk menghasilkan padi yang berkualitas dan kuantitas. Desa Bangsa menjadi salah satu penghasil komoditas padi terbesar di Kecamatan Kebasen dengan urutan ke empat sebesar 12.675 kuintal pada tahun 2022. Dan hanya komoditas padi yang disubsidi pupuk oleh pemerintah. Dimana masyarakat di Desa Bangsa mayoritas menanam komoditas padi. Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas dimana banyak yang menanam tidak hanya komoditas padi tetapi juga jenis tanaman palawija lainnya dan disubsidi pupuk oleh pemerintah. Dengan adanya program kartu tani petani memerlukan pupuk bersubsidi untuk meringankan biaya produksi. Pupuk yang didapatkan harus terdaftar dalam suatu kelompok tani untuk persyaratan mendapatkan pupuk bersubsidi. Di Desa Bangsa terdapat beberapa kelompok tani yang terdaftar dalam kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelompok tani yang berada di Desa Bangsa dapat dilihat pada Tabel 2 beberapa kelompok tani di Desa Bangsa.

Tabel 2. Jumlah Kelompok Tani Padi Pemilik Kartu Tani dan Penerima Alokasi Pupuk Bersubsidi Desa Bangsa Tahun 2023

No	Nama Kelompok Tani	Petani Usahatani Padi (orang)
1.	Kamal	40
2.	Tani Makmur	94
3.	Sri Mulyo	34
4.	Sri Rejeki	130
	Jumlah	298

Sumber: BPP Kecamatan Kebasen Tahun 2023

Pada Tabel 2 menunjukkan terdapat 4 kelompok tani di Desa Bangsa yang memiliki kartu tani yaitu kelompok Tani Kamal, Tani Makmur, Sri Mulyo, dan Sri Rejeki dengan total berjumlah 298 orang. Pada saat ini kartu tani sangat dibutuhkan bagi kelompok tani namun keberadaannya masih menjadi pro-kontra dimasyarakat petani di Desa Bangsa karena jumlah pupuk yang didapatkan dirasa kurang sesuai untuk pemupukan permusimnya. Selain itu juga kartu tani akan *diupdate* setiap tahunnya menjadi permasalahan karena banyak masyarakat petani yang kurang mengerti mengenai pembaharuan data menjadikan petani yang memiliki

kartu tani menjadi tidak muncul jumlah pupuk bersubsidi yang tertera pada kartu tani dikarenakan data petani sudah di non aktifkan ataupun nama yang tertera tidak sama dengan kartu identitas pribadi (KTP) dan menjadi perdebatan dikalangan petani sehingga keberadaan kartu tani menjadi sulit diterima pada masyarakat petani di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Program kartu tani yang mulai dijalankan pada tanggal 1 September 2020 dengan harapan dapat meringankan kesulitan petani pada biaya pupuk yang mahal. Pada tema yang diambil memiliki kemiripan dengan latar belakang permasalahan yang ada pada petani di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan adanya penyaluran pupuk dengan menggunakan kartu tani dan menjadikan dasar penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Tani Pada Usahatani Padi (*Oryza Sativa L.*) Di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani padi pemilik dan pengguna kartu tani di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan kartu tani di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen?
3. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan kartu tani pada usahatani padi di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat petani padi pengguna kartu tani di Desa Bangsa.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi kartu tani di Desa Bangsa.
3. Mengetahui efektivitas implementasi kebijakan kartu tani pada usahatani padi di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan ilmu.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi menambah wawasan mengenai metode yang digunakan
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti sebagai media belajar dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari untuk membantu masyarakat petani padi dalam menganalisis program kartu tani terhadap implementasi di masyarakat petani.
 - b. Bagi dinas yang terkait dapat menjadi langkah untuk mengambil kebijakan pada petani mengenai penggunaan kartu tani di masyarakat petani.

- c. Bagi Universitas sebagai bahan kajian keilmuan yang bisa dikembangkan selanjutnya.

E. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilaksanakan dengan responden merupakan petani padi.
2. Petani tanaman padi menjadi responden merupakan petani padi sebagai pemilik dan pengguna kartu tani.
3. Penelitian dilaksanakan di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen.
4. Data yang digunakan merupakan data tahun 2023.
5. Masalah yang diteliti merupakan karakteristik sosial ekonomi petani pemilik dan pengguna kartu tani, faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan kartu tani, dan efektivitas implementasi kebijakan kartu tani pada usahatani padi di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.